



Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi dalam Saudi Vision 2030

Misliharira Shaumi Putri, Reni Windiani, Satwika Paramasatya
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Saudi Arabia with their conservative political life tends to create boundaries in the country. But after King Salman's ascension to lead the country, Prince Mohammed bin Salman obtain power and authority in the country and created a plan by liberalizing the country. In Prince Mohammed bin Salman's plan, which called Saudi Vision 2030, he has several goals that will be achieved and one of them is called a thriving economy point where the economy of Saudi Arabia can let go of their oil dependence and open opportunities for cooperation with other countries. In analysing this, the concept of economic liberalization will be used to explain Prince Mohammed bin Salman's decision in carrying out the Saudi Vision 2030. This research is a qualitative research using data techniques through literature study. The result of this study indicates that the reason Prince Mohammed bin Salman used liberalization is to advance the economy of Saudi Arabia and also to open opportunities with other countries as an alternative to detach Saudi Arabia's oil dependence which has not been successfully implemented in other ways. Even though it is considered to be against the principles of the country, Saudi Vision 2030 has made changes gradually and has also had a good impact on Saudi Arabia.

Keywords: Arab Saudi, Economic Liberalization, Saudi Vision 2030, a thriving economy

PENDAHULUAN

Negara Arab Saudi merupakan negara yang berbentuk Monarki Absolut, dimana raja memegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Sehingga pada masa pemerintahan Raja Salman, ia dapat mengangkat dan memberikan wewenang kepada Pangeran Mohammed bin Salman sebagai putra mahkota. Pangeran Mohammed bin Salman kemudian menciptakan perubahan-perubahan baru terhadap Arab Saudi melalui Saudi Vision 2030 yang merupakan *framework* strategi untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak, serta mengembangkan sektor-sektor lain seperti kesehatan, edukasi, sampai dengan pariwisata. Dikutip dari website resmi Saudi Vision 2030 (vision2030.gov.sa/en), tercantum beberapa pilar utama dalam strategi ini yang salah satunya adalah *a thriving economy*. Pangeran Mohammed bin Salman melakukan strategi tersebut yang berfokus pada perekonomian negara mereka agar Arab Saudi tidak terlalu bergantung

pada penghasilan dari produksi minyak mereka yang terus menurun. Dalam suatu data yang dihadirkan oleh World Bank, dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Arab Saudi melambat menjadi 1,7% pada 2019. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi sedangkan produksi minyak harus dikurangi karena adanya tekanan dari OPEC. Selain itu, serangan terhadap fasilitas Aramco yang terjadi pada 14 September di tahun yang sama juga mengakibatkan pemangkasan produksi sebesar 5,7 juta barel per hari atau mencapai 50% dari total produksi harian (CNN Indonesia, 2019).

Dalam *a thriving economy*, yang merupakan salah satu pilar dalam Saudi Vision 2030, dipaparkan rencana Arab Saudi dalam memajukan perekonomian. Sampai dengan saat ini, perlahan-lahan Arab Saudi mulai memberikan perubahan. Beberapa diantaranya, Saudi Vision 2030 berusaha membuka kerjasama Arab Saudi dengan negara lain, menciptakan proyek pembangunan berkelanjutan, dan mengurangi angka pengangguran. Pangeran Mohammed bin Salman juga menunjukkan bahwa 64% dari total angka pengangguran di Arab Saudi adalah perempuan yang tersebut timbul akibat partisipasi perempuan pada ranah kerja masih sangat dibatasi (Arabian Business, 2020). Sehingga penting untuk menciptakan perubahan kebijakan yang kemudian dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah kerja untuk mengurangi angka tersebut. Selain itu, perekonomian Arab Saudi sudah lama bergantung pada minyak yang ternyata tidak selalu mengalami kenaikan ataupun memperoleh keuntungan. Apabila Arab Saudi tidak meningkatkan angka pendapatan non minyak dan tetap pada tingkat pendapat yang sama pada tahun 2015, yaitu sekitar SR100 milyar, maka Arab Saudi harus mengurangi beberapa pengeluaran lain seperti gaji karyawan pada sektor publik, membatalkan tunjangan dan bonus karyawan, sampai dengan memberhentikan pengoperasian dan pemeliharaan aset negara. Maka dari itu, Saudi Vision 2030 telah dirancang sedemikian rupa untuk menghindari kemunduran Arab Saudi sebagai negara maju dalam jangka waktu yang panjang bahkan dapat memajukan negara tersebut dan mempertahankan *power* negara mereka untuk jangka waktu yang lama.

Dalam penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, belum ada yang berfokus pada pelaksanaan Saudi Vision 2030 ini terutama dalam poin *a thriving economy*. Penelitian terdahulu lebih menjelaskan terkait hubungan antara pelaksanaan Saudi Vision 2030 ini dengan masyarakat Arab Saudi sendiri (Al Surf & Mostafa, 2016) dan juga terkait *shifting* Arab Saudi yang sebelumnya mengandalkan perdagangan minyak untuk perekonomian negaranya, menjadi *knowledge-based economy* (Nurrunabi, 2017). Sedangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembaruan dalam sisi akademis, terutama dalam pembahasan pelaksanaan Saudi Vision 2030. Berdasarkan dari latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yaitu “mengapa Pangeran Mohammed bin Salman ingin mencapai poin *a thriving economy* dalam Saudi Vision 2030 dengan menggunakan strategi liberalisasi ekonomi negara?”.

Penelitian ini menggunakan konsep liberalisasi ekonomi untuk menganalisis tindakan atau strategi Pangeran Mohammed bin Salman. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian (Sugiyono, 2005). Penelitian ini menggunakan teknik

pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi literatur untuk mendapatkan data-data yang relevan dan dapat diakses secara *online*.

PEMBAHASAN

Negara Arab Saudi merupakan negara berbasis agama Islam sehingga pemerintahan yang ada di negara tersebut cukup berbeda dengan negara-negara lain. Ketika Raja Salman mulai menjabat sebagai raja, perlahan Arab Saudi mulai melakukan perubahan-perubahan dan memperkuat kerjasama negara mereka dengan negara lain. Meskipun begitu, Raja Salman sendiri belum cukup agresif untuk dapat menciptakan alternatif baru untuk ketergantungan Arab Saudi dengan ekspor minyak dan lebih cenderung masih terus berusaha menstabilkan perdagangan minyak mereka. Pada 2015 lalu, Raja Salman yang baru menjabat sebagai Raja Arab Saudi dikatakan masih akan mengikuti kebijakan pendahulunya dalam hal perminyakan dan mempertahankan tingkat produksi minyak. Bahkan Raja Salman masih optimis dapat mengatasi permasalahan minyak dunia dengan cara-cara terdahulu (Republika, 2015). Kemudian diangkatlah Pangeran Mohammed bin Salman sebagai Putra Mahkota yang kemudian memiliki wewenang dalam pemerintahan Arab Saudi. Pangeran Mohammed bin Salman menciptakan Saudi Vision 2030 pada tahun 2016 dengan harapan ketergantungan akan minyak di Arab Saudi dapat segera teratasi.

Pada awal tahun 2014, harga minyak masih cenderung stabil di angka \$110 per barel. Namun setelah beberapa bulan, tepatnya di bulan Juli, harga minyak menjadi jatuh ke angka terendah yaitu kurang dari \$50 per barel (BBC, 2015). Beberapa penyebab dari turunnya harga minyak ini antara lain karena adanya ekonomi dunia yang melambat sehingga permintaan akan minyak juga menurun dan terdapat alternatif lain sebagai bahan bakar, kekacauan Irak dan Libya, Amerika Serikat menyusul Arab Saudi sebagai negara penghasil minyak sehingga tidak bergantung pada Arab Saudi lagi, dan keputusan Arab Saudi dan *The Gulf Allies* untuk tidak mengorbankan pasar dan mengembalikan harga (The Economist, 2014). Selain perdagangan minyak, Arab Saudi juga menerima pendapatan mereka dari haji dan umroh yang sebagian besar didapatkan dari Mekkah dan Madinah. Meskipun pendapatan umroh dan haji ini cukup besar, tetapi keduanya hanya menambahkan \$12 miliar ke GDP Arab Saudi setiap tahunnya yang menyumbang 20% dari GDP non-minyak dan total 7% dari total GDP. Sedangkan pendapatan minyak sendiri menyumbang 87% dan industri yang terkait dengan minyak menyumbang 42% pada GDP Arab Saudi (TRT World, 2020). Dengan adanya hal-hal tersebut yang kemudian berdampak pada perekonomian Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman berusaha menciptakan alternatif lain untuk negaranya dan membawa perubahan pada Arab Saudi dan direalisasikan dalam bentuk Saudi Vision 2030.

Saudi Vision 2030 ini berisi *long-term goals* yang ingin dicapai Negara Arab Saudi, salah satunya melepas ketergantungan negara mereka dengan perdagangan minyak. Pangeran Mohammed bin Salman mengatakan bahwa rencana tersebut dibuat berdasarkan '*unique strengths and capabilities*' dari Arab Saudi sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi pada Arab Saudi merupakan suatu hal yang baru bagi negara tersebut. Maka dari itu, Saudi Vision 2030 yang cukup membawa hal yang berbeda terutama dalam kebijakan di Arab Saudi, juga dianggap sebagai hal baru baik bagi pemerintahan Arab Saudi maupun masyarakatnya. Saudi Vision 2030 memiliki 3 pilar utama dalam pelaksanaannya; *a vibrant society, a thriving economy, dan an ambitious nation* (Vision 2030 n.d.). Dalam pelaksanaan poin *a thriving economy* sendiri,

terdapat beberapa fokus utama dalam bidang perekonomian Arab Saudi yaitu *a thriving economy rewarding opportunities*, *a thriving economy investing for the long-term*, dan *a thriving economy open for business*.

A Thriving Economy Rewarding Opportunities

Tujuan pertama merupakan *a thriving economy rewarding opportunities*, dimana Arab Saudi akan mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kontribusi SME (*Small-Medium Enterprises*) pada GDP negara hingga 35%, dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah kerja hingga 30%. Sebelumnya, perempuan lebih mungkin dipekerjakan dalam sektor publik meskipun tidak menutup kemungkinan juga perempuan dapat bekerja pada sektor swasta (AlMunajjed, 2010). Meskipun diciptakannya lapangan pekerjaan baru yang banyak dan memadai, angka pengangguran Arab Saudi tidak akan berkurang apabila perempuan belum diperbolehkan berpartisipasi dalam angkatan kerja. Data yang diberikan oleh Saudi Arabia Monetary Agency (SAMA) memberikan gambaran bahwa sampai dengan tahun 2008 angka pengangguran perempuan masih sangat tinggi apabila dibandingkan dengan laki-laki di Arab Saudi. Maka dari itu, Saudi Vision 2030 juga berusaha untuk terus menerus meningkatkan partisipasi perempuan, khususnya dalam angkatan kerja. Tidak hanya itu, perempuan yang sebelumnya menjadi ‘minoritas’ dalam negara yang memegang budaya patriarki tersebut juga mulai mendapatkan hak-hak mereka yang sebelumnya sangat terbatas. Perempuan yang sebelumnya dibatasi, terutama dalam ranah pekerjaan, akhirnya diberikan kebebasan dalam bekerja dengan mengikuti peraturan baru yang lebih longgar. Dalam 7 bulan pertama di tahun 2017, The General Organization Social Insurance memberikan data bahwa sekitar 500.000 perempuan Arab Saudi memasuki pasar tenaga kerja baik di sektor swasta maupun publik. Masuknya perempuan dalam angkatan tenaga kerja ini juga akan mengurangi angka pengangguran negara yang saat ini berada pada angka 11,6%. Dengan adanya partisipasi perempuan ini, Arab Saudi akan menurunkan angka pengangguran ini menjadi 7% (Jameel, 2018). Dengan berkembangnya kesempatan kerja bagi perempuan, pemerintah juga menekankan profesionalisme bagi karyawan dan menetapkan persyaratan dalam perilaku mereka selama bekerja. Agar norma budaya Arab Saudi tidak semakin terkikis dan melemah, pemerintah juga memberikan persyaratan tertentu seperti tidak diperbolehkannya pertemuan pribadi antara perempuan dan laki-laki, berpakaian sederhana dan tidak terbuka, serta dipastikan apabila dalam pekerjaan yang menggunakan *shift* maka minimal dua wanita harus bekerja pada *shift* yang sama (Clyde & Co, 2020).

A Thriving Economy Investing for the Long-Term

Tujuan kedua merupakan *a thriving economy investing for the long-term*. Arab Saudi berusaha mencapai peringkat 15 besar dalam peringkat negara dengan perekonomian terbesar, meningkatkan lokalisasi sektor minyak dan gas, serta meningkatkan asset Dana Investasi Publik mereka. Seperti yang kita ketahui selama bertahun-tahun perekonomian Arab Saudi masih sangat bergantung pada perdagangan minyak karena Arab Saudi memiliki sumber minyak yang berlimpah. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi dan pendidikan, memiliki sumber minyak yang berlimpah bukanlah suatu keunggulan lagi. Saudi Vision 2030 sendiri telah merancang berbagai macam strategi untuk melepaskan ketergantungan mereka; mulai dari memperkuat sektor pariwisata Arab Saudi sampai dengan membuka peluang investasi bagi negara

asing. Meskipun perdagangan minyak sedang mengalami ketidakstabilan dan cenderung terus menurun, Arab Saudi tetap berusaha untuk memperkuat perusahaan minyak mereka salah satunya dengan melakukan penawaran saham perdana atau *initial public offering* (IPO) dari perusahaan minyak Saudi Aramco. Amin Nasser sebagai CEO dari Saudi Aramco menyatakan bahwa IPO ini akan meningkatkan visibilitas internasional Arab Saudi sebagai perusahaan terkemuka di dunia (CNN, 2019). Proses penawaran resmi saham ini sendiri dimulai pada 17 November 2019. Langkah ini merupakan bentuk liberalisasi dari sektor perekonomian mereka yang saat ini sudah sangat terbuka dengan investor asing. Seorang analis mengatakan bahwa IPO yang diadakan Arab Saudi ini dianggap sebagai transformasi nasional yang nantinya akan memperkuat Dana Investasi Publik (PIF) dan tentunya mewujudkan Saudi Vision 2030 (Market Watch, 2019).

Setelah diumumkannya rencana besar Arab Saudi ini, dunia internasional merespon dengan cukup antusias. Duta Besar Inggris di Arab Saudi, Simon Collis, mengatakan bahwa negaranya akan menyambut dengan baik dan terus terlibat seiring dengan implementasi Saudi Vision ini. Begitu pula dengan Amerika Serikat yang memberikan pernyataan bahwa mereka akan dengan senang hati ikut membantu Arab Saudi menciptakan diversifikasi ekonomi tersebut (Al Arabiya, 2016). Saudi Vision 2030 juga memberikan banyak peluang baru dalam mengembangkan perekonomian Arab Saudi. Peluang ini termasuk dalam pengembangan situs bersejarah di Al Noor dan Pegunungan Thur. Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi juga mendorong SME untuk berinvestasi di perusahaan yang menawarkan layanan umroh untuk mempermudah proses birokrasi dan dapat mendukung bisnis mereka juga. *Small and Medium-sized Enterprises* atau SME ini juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Arab Saudi. Jadwa Investment yang merupakan perusahaan Arab Saudi yang beroperasi dibawah pengawasan Capital Markets Authority (CMA), memberikan uraian mengenai Saudi Vision 2030 dan SME yang dapat berkontribusi pada GDP negara dari 20% menjadi 35% pada tahun 2030. Selain membantu GDP negara, memacu pertumbuhan ekonomi, dan memberikan peluang kerja, adanya SME ini juga dapat membantu diversifikasi ekonomi yang diinginkan dalam Saudi Vision 2030. Dalam membantu perkembangan SME, pemerintah Arab Saudi memberikan beberapa dukungan. Salah satunya, pemerintah akan mengganti biaya operasional tiga tahun pertama SME yang terdaftar antara 2016 sampai dengan 2021.

A Thriving Economy Open for Business

Dalam poin *a thriving economy open for business*, Arab Saudi memiliki target untuk meningkatkan posisi Arab Saudi dalam 10 besar *Global Competitiveness Index*, meningkatkan Investasi Asing Langsung menjadi tingkat internasional dengan angka GDP sebesar 5,7%, dan meningkatkan kontribusi sektor swasta dalam GDP menjadi 65%. Sehingga Arab Saudi berusaha membuka peluang-peluang pekerjaan tersebut dalam berbagai sektor. Pada September 2019, Arab Saudi memperbolehkan pembuatan visa dengan tujuan wisata yang sebelumnya hanya diperbolehkan bagi jamaah haji dan umroh, pebisnis dan pekerja. Arab Saudi juga membuka *visa on arrival* yang mendatangkan 24.000 wisatawan asing terhitung sejak 10 hari setelah diumumkannya terkait pembuatan visa untuk wisata tersebut. Hal ini juga dilakukan untuk memenuhi salah satu tujuan dalam yang terdapat dalam Saudi Vision 2030 yaitu meningkatkan angka sektor wisata ini sekitar 10% pada GDP negara yang saat ini masih berada di angka 3% (CNN, 2019). Beberapa proyek yang telah disiapkan oleh

Arab Saudi adalah Red Sea Project dan Qiddiya. Selain kedua proyek tersebut dapat memberikan peluang investor dan mendatangkan turis, kedua proyek tersebut juga akan membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar bagi masyarakat Arab Saudi. Salah satu bentuk kerjasama yang terbentuk dalam proyek ini adalah Arab Saudi bekerjasama dengan Hyatt Hotels yang merupakan salah satu perusahaan perhotelan multinasional Amerika Serikat yang mengelola hotel mewah dan tempat-tempat wisata. Kemudian untuk mendukung Saudi Vision 2030 ini, Hyatt Regency Riyadh Olaya mengumumkan kemitraan dengan Hotel and Tourism Management Institute Switzerland yang merupakan perusahaan yang memberikan *Education for Employment* (EFE) dalam upaya untuk mendukung Saudi Vision 2030 dan akan mensponsori pelatihan calon pekerja perempuan pada hotel-hotel yang akan dibangun dan juga pada proyek besar Arab Saudi, Red Sea Project.

Banyak sekali alternatif untuk pemasukan baru Arab Saudi yang bukan berasal dari ekspor minyak setelah adanya liberalisasi ini. Selain sektor pariwisata yang merupakan proyek besar Saudi Vision 2030, Pangeran Mohammed bin Salman juga mengundang *boyband* yang berasal dari Korea Selatan untuk mengadakan konser dan juga membuka kembali bioskop setelah bertahun-tahun lamanya. Tiket konser *boyband* BTS pada 11 Oktober 2019 lalu di Stadium Internasional King Fahd dengan kapasitas 70.000 orang ini terjual habis. Konser ini juga merupakan pertama kalinya perempuan dapat masuk ke dalam stadium dan juga konser pertama dengan artis yang berasal dari negara lain. Adanya keterbukaan Arab Saudi merupakan salah satu langkah besar yang nantinya dapat terus menstabilkan perkembangan Arab Saudi, khususnya dalam perekonomian. Beberapa strategi Pangeran Mohammed bin Salman yang sudah berjalan ini merupakan salah satu bukti bahwa meliberalisasi negara dengan melonggarkan kebijakan yang ada bukanlah suatu hal yang buruk dan justru dapat mendukung Arab Saudi untuk mengembangkan dan memajukan negaranya.

Stephen Grand dan Katherin Wolff, melalui website Atlantic Council (atlanticcouncil.org), menjelaskan progres Saudi Vision 2030 selama 4 tahun berjalan yaitu sampai dengan tahun 2020 ini. Sejauh ini, akses terhadap data terkait Saudi Vision 2030 ini terbatas namun beberapa perkembangannya dapat dilihat melalui progres yang terlihat. Terlepas dari progres kecil yang diberikan pada data tersebut, Arab Saudi masih memiliki banyak peluang lain yang telah direncanakan dalam Saudi Vision 2030 meskipun belum terlihat. Selain itu, Saudi Vision 2030 telah memberikan Arab Saudi banyak peluang kerjasama dengan negara lain dan salah satunya adalah Amerika Serikat yang menjadi *partner* dalam beberapa pembangun proyek besar dalam Saudi Vision 2030. Kemudian, sumber daya manusia juga akan menjadi aset jangka panjang dalam rencana reformasi Arab Saudi, didukung dengan adanya pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja dan juga meningkatkan kualitas pendidikan.

KESIMPULAN

Pangeran Mohammed bin Salman mendorong pelaksanaan Saudi Vision 2030 untuk mencapai poin *a thriving economy* karena ingin memperkuat perekonomian Arab Saudi dan memberikan alternatif untuk meninggalkan ketergantungan negara pada ekspor minyak yang tidak menentu dan cenderung menurun dalam beberapa tahun ini. Penelitian ini menggunakan konsep liberalisasi dalam menjelaskan keputusan yang diambil oleh Pangeran Mohammed bin Salman. Konsep liberalisasi pada dasarnya digunakan oleh negara yang ingin menghapuskan batasan-batasan

tertentu yang sebelumnya menghalangi negara tersebut untuk memajukan negaranya. Arab Saudi sendiri selama bertahun-tahun masih berpegang pada syariat Islam dan membatasi banyak hal. Sehingga Pangeran Mohammed bin Salman mengambil keputusan tersebut agar dapat mencoba memberikan alternatif lain yang sebelumnya belum dilaksanakan oleh pemerintah Arab Saudi. Dengan adanya Saudi Vision 2030, Arab Saudi perlahan mulai menciptakan kebijakan-kebijakan baru terhadap perekonomian dan peraturan-peraturan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, pelaksanaan Saudi Vision 2030 sampai dengan saat ini masih berjalan dengan lancar dan memberikan pandangan baru bagaimana Arab Saudi kedepannya akan berkembang.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan Pangeran Mohammed bin Salman menggunakan strategi liberalisasi dalam mencapai Saudi Vision 2030 ini adalah untuk melepaskan ketergantungan Arab Saudi pada minyak mereka tanpa mengurangi pemasukan negara. Selain itu, Arab Saudi merupakan negara yang dikenal memiliki *power* dalam dunia global sehingga Arab Saudi perlu lebih mengekspos negara mereka dalam dunia internasional, salah satunya dengan menciptakan kerjasama dan kesepakatan perekonomian bagi kedua negara. Selain dapat membantu nama Arab Saudi dalam dunia global, hal tersebut juga dapat membantu pembangunan Arab Saudi. Khususnya dalam Saudi Vision 2030 yang merupakan rencana jangka panjang Arab Saudi ini. Selain itu, respons positif dari masyarakat luar terhadap kebijakan-kebijakan baru ini membuat kunjungan masyarakat asing ke Arab Saudi meningkat drastis, sehingga Pangeran Mohammed bin Salman merasa bahwa salah satu tujuannya dalam Saudi Vision 2030 untuk meningkatkan perekonomian dengan cara yang 'baru' merupakan hal yang memang dibutuhkan Arab Saudi yang harus lepas ketergantungan dari penjualan minyak.

REFERENSI

- Al Arabiya, 2016. "World reacts to Saudi Arabia's 'Vision 2030'". [Online] Diakses melalui: <https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/04/26/Global-reactions-to-Saudi-Vision-2030-announcement>
- AlMunajjed, M, (2010). "Women's Employment in Saudi Arabia a Major Challenge". Booz & Co. [Online] Diakses melalui: https://www.arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/235.womens_employment_in_saudi_arabia_a_major_challenge.pdf
- Arabian Business, 2020. "Saudi Crown Prince talks economy, corruption, reforms and jobs". [Online] Diakses melalui: <https://www.arabianbusiness.com/culture-society/454581-saudi-crown-prince-talks-economy-corruption-reforms-jobs>
- Atlantic Council, 2020. "Assesing Saudi Vision 2030: A 2020 Review". [Online] Diakses melalui: <https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/06/Assessing-Saudi-Vision-2030-A-2020-review.pdf>
- Clyde & Co, 2020. "Saudi Arabia Promoting Women in the Workforce: 2020 Each for Equal – the decade ahead to Vision 2030". [Online] Diakses melalui: <https://www.clydeco.com/en/insights/2020/01/promoting-women-in-the-workforce-2020-each-for-equ>
- CNN Indonesia, 2019. "Serangan Drone di Arab Saudi Potensi Dongkrak Harga Minyak". [Online] Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190915120419-85-430599/serangan-drone-di-arab-saudi-potensi-dongkrak-harga-minyak>

- CNN, 2019. "Saudi Arabia announces IPO of world's most profitable company". [Online] Diakses melalui: <https://edition.cnn.com/2019/11/03/investing/saudi-aramco-ipo/index.html>
- Market Watch, 2019. "The most important thing to know about the Saudi Aramco IPO". [Online] Diakses melalui: <https://www.marketwatch.com/story/the-most-important-thing-to-know-about-the-saudi-aramco-ipo-2019-12-06>
- Nurrunabi, Mohammad, 2017. "Transformation from an Oil-based Economy to a Knowledge-based Economy in Saudi Arabia: the Direction of *Saudi Vision 2030*". New York: Business Media New York.
- Sugiyono, 2005. "Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif", Bandung: Alfabeta.
- TRT World, 2020. "How important is the Umrah pilgrimage for the Saudi economy?". [Online] Diakses melalui: <https://www.trtworld.com/middle-east/how-important-is-the-umrah-pilgrimage-for-the-saudi-economy-34163>